



**NILAI TUKAR PETANI (NTP)
SEBAGAI INDIKATOR
TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI**

**Dr. Ali Rosidi
Direktur Statistik Keuangan & Harga
Badan Pusat Statistik**

Disajikan Pada:

Pertemuan Dan Diskusi Terbatas Mengenai "Nilai Tukar Petani (NTP)"

Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian

Departemen Pertanian

Bogor, 15 Maret 2007

1.1. Latar Belakang

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani. Hubungan NTP dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat dari posisi It yang berada pada pembilang (enumerator) dari angka NTP. Apabila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Perkembangan harga yang ditunjukkan It, merupakan sebuah indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan. It nasional pada bulan Desember 2006 (1993 = 100) tercatat 608,08; ini berarti bahwa tingkat harga produk pertanian mengalami kenaikan harga secara rata-rata hampir 6,1 kali lipat dibandingkan dengan tingkat harga produk yang sama pada tahun dasar 1993. Sejauh mana pertambahan pendapatan petani selama 13 tahun terakhir ini dapat mensejahterakan petani dan keluarganya, sangat tergantung dari berapa besar selisih/margin pendapatan petani yang dipakai untuk konsumsi/kebutuhan pokoknya (subsistence).

Oleh karena itu untuk melihat tingkat kesejahteraan petani secara utuh perlu juga dilihat sisi yang lain yaitu perkembangan jumlah pengeluaran/pembelanjaan mereka baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi. Dalam hal ini petani sebagai produsen dan juga konsumen dihadapkan kepada pilihan dalam mengalokasikan pendapatannya yaitu: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup petani beserta keluarganya. Kedua, pengeluaran untuk produksi/budidaya pertanian yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakup biaya operasional produksi dan investasi atau pembentukan barang modal. Unsur kedua ini hanya mungkin dilakukan apabila kebutuhan pokok petani telah terpenuhi; dengan demikian investasi dan pembentukan barang modal merupakan faktor penentu bagi tingkat kesejahteraan petani.

Perkembangan harga barang kebutuhan petani baik untuk konsumsi maupun produksi ditunjukkan oleh Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib). Pada bulan Desember 2006 tercatat Ib sebesar 574,84 (1993 = 100) ; ini berarti tingkat harga kebutuhan petani naik 5,75 kali dibandingkan dengan tingkat harga pada tahun 1993. Dengan membandingkan kedua perkembangan harga tersebut dalam satu parameter/ukuran yaitu NTP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya. Atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan.

Dengan perkataan lain, NTP menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa konsumsi.

1.2. Arti Angka NTP

NTP merupakan nilai tukar (term of trade) antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam persen. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani (I_t) dan barang dan jasa yang dikonsumsi petani (I_b). Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus. Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan pertambahan pendapatan petani sangat erat. Karena pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka NTP merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani.

Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu:

- a. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- b. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas/break even. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
- c. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

1.3. Kegunaan dan Manfaat

NTP sebagai sebuah indikator perkembangan harga berguna antara lain:

- a. Dari indeks harga yang diterima petani (I_t) dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
- b. Dari indeks harga yang dibayar petani (I_b), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari

masyarakat dipedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.

- c. Nilai tukar petani (NTP) mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar (term of trade) produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga. Dari angka ini sekurang-kurangnya dapat diperoleh gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu ke waktu yang dapat dipakai sebagai dasar kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan petani.
- d. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing (competiveness) produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk specialization dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

1.4. Ruang Lingkup

a. Cakupan Komoditas

Data komoditas pertanian yang dimonitor perkembangan harganya untuk penghitungan NTP meliputi produk-produk pertanian yang termasuk dalam : pertama sub sektor Tanaman Bahan Makanan (TBM) seperti padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jumlah komoditas yang tercakup dalam sub-kelompok TBM ini bervariasi antar daerah dari 15 sampai dengan 22 komoditas. Kedua adalah produk-produk pertanian yang termasuk dalam sub-sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau dan kapuk odolan. Jumlah komoditas ini juga bervariasi antar daerah tergantung dari jenis perkebunan apa yang ditanam petani di daerahnya. Saat ini sedang dikembangkan untuk memperluas cakupan komoditasnya, sehingga dimasa yang akan datang NTP akan juga mencakup sub-sektor lain yaitu: peternakan dan perikanan. Hal ini mengingat peranan sub-sektor tersebut sangat penting dan jumlah rumah tangga yang tergantung hidupnya dari peternakan, perikanan dan kehutanan cukup besar. Oleh karena itu perlu dihitung NTP untuk peternak, nelayan dsb.

b. Cakupan wilayah

Wilayah yang tercakup dalam penghitungan NTP meliputi 28 propinsi yaitu: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, Banten, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

1.5. Rencana Pengembangan

Rencana ke depan dalam penghitungan NTP nanti akan dilakukan penggantian tahun dasar, yaitu dari tahun dasar 1993 (1993 = 100) akan diganti menjadi tahun dasar 2006 (2006 = 100), selain itu juga cakupan sub sektornya juga akan diperluas yaitu dari dua sub sektor: sub sektor Tanaman Bahan Makanan (TBM), dan Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) menjadi empat sub sektor: sub sektor Tanaman Bahan Makanan (TBM), Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR), Peternakan, dan Perikanan.

Selain itu, cakupan wilayah juga akan diperluas 4 propinsi baru lagi yaitu: Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Dengan demikian kedepan NTP akan mencakup hampir seluruh wilayah propinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta.

Dimasa depan tuntutan akan data NTP pada tingkat kabupaten juga semakin mendesak. Tidak tertutup kemungkinan survei yang akan datang diperluas dan diperbesar sampelnya setiap propinsi sehingga mampu menyajikan NTP tingkat kabupaten

2.1. Metodologi Pengumpulan Data

Pengumpulan data harga dilakukan melalui wawancara langsung kepada responden (petani/pedagang/penjual jasa) dengan menggunakan daftar isi HP-IA, HP-IB, HP-2.1, dan HP-2.2.

- a) Daftar HP-IA dan HP-IB digunakan untuk mencatat harga eceran barang/jasa kelompok makanan dan bukan makanan untuk keperluan konsumsi rumah tangga petani. Pencatatan harga dilakukan setiap bulan pada hari pasaran yang terdekat dengan tanggal 15.
- b) Daftar HP-2.1 digunakan untuk mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian tanaman bahan makanan. Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15 dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 di bulan yang bersangkutan.
- c) Daftar HP-2.2 digunakan untuk mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian tanaman perkebunan rakyat. Pencatatan harganya sama dengan pelaksanaan pencatatan harga untuk daftar HP-2.1.

2.2. Pemilihan Sampel (Kecamatan)

Kecamatan terpilih di dalam pencacahan statistik harga produsen didasarkan pada rancangan sampling dua tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama, dari setiap propinsi dipilih secara purposive sejumlah kabupaten yang merupakan daerah sentra produksi pertanian,
- b. Tahap kedua, dari setiap kabupaten terpilih dipilih sejumlah kecamatan yang merupakan sentra produksi pertanian sesuai dengan daftar kecamatan yang telah ditentukan oleh masing-masing propinsi.
- c. Dalam pemilihan kecamatan observasi, jumlah untuk propinsi di Jawa adalah 3 (tiga) kecamatan untuk setiap kabupaten, sedangkan untuk sampel per propinsi di luar Jawa dipilih sebanyak 15 sampai 20 kecamatan.

2.3. Pemilihan Pasar

Pemilihan Pasar di kecamatan terpilih berdasarkan kriteria:

- a. Paling besar di kecamatan tersebut
- b. Beraneka ragam barang yang diperdagangkan
- c. Kebanyakan masyarakat berbelanja di sana
- d. Dapat dijamin kelangsungan (kontinuitas) pencatatan harganya.
- e. Pasar terletak di desa pedesaan.

2.4. Pemilihan Responden

- a. Responden Harga Konsumen Pedesaan adalah:
 - i Pedagang di setiap pasar diwawancarai 3-4 pedagang untuk setiap jenis harga barang yang diperjualbelikan.
 - ii Dokter praktek, rumah sakit, tukang pangkas rambut, tukang jahit, sekolah dan lain sebagainya.
- b. Responden Harga Produsen adalah Petani, Peetani tersebut dipilih dengan kriteria sebagai berikut:
 - i Tinggal di desa pedesaan (kecamatan pedesaan)
 - ii Menjual bermacam-macam produksi, hasil pertanian dengan kata lain petani yang kaya.
 - iii Pencatatan harga terjamin secara kontinyu.

2.5. Penggantian Responden

Penggantian responden dapat dilakukan apabila di lapangan dijumpai hal-hal berikut:

- a) Pedagang eceran sudah bangkrut.
- b) Pedagang eceran beralih menjadi pedagang besar(grosir).
- c) Pedagang eceran beralih usaha jenis barang yang lain.

Responden pengganti dipilih responden yang menjual jenis barang dan jasa yang sama dengan responden yang digantinya dan diusahakan untuk mendapatkan data harga satu bulan yang lalu.

2.6. Formula

Rumus yang digunakan pada penghitungan Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib) adalah formula Indeks Laspeyres yang dikembangkan (Modified Laspeyres Indices), yaitu:

$$I_t = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ti}}{P_{(t-1)i}} P_{(t-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{0i} Q_{0i}} \times 100$$

dimana,

- I_t = Indeks harga bulan ke t baik I_t maupun I_b
- P_{ti} = Harga bulan ke t untuk jenis barang ke i
- $P_{(t-1)i}$ = Harga bulan ke (t-1) untuk jenis barang ke i
- $\frac{P_{ti}}{P_{(t-1)i}}$ = Relatif harga bulan ke t dibanding ke (t-1) untuk jenis barang ke i
- $P_{(t-1)i}$ = Harga pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i
- Q_{oi} = Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i
- m = Banyak jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas

Pertimbangan dan asumsi yang mendasari penggunaan formula di atas adalah:

- 1) *Trend* harga tidak dipengaruhi oleh perbedaan kualitas atau spesifikasi komoditas.
- 2) Perbedaan harga komoditas antar kabupaten tidak berpengaruh.
- 3) Dapat dilakukan penggantian spesifikasi atau penggantian kualitas jenis barang.

Namun demikian untuk mempermudah penghitungan rumusan diatas, maka digunakan rumusan indeks sebagai berikut:

$$I_t = \frac{\sum_{i=1}^m DT_{ti}}{\sum_{i=1}^m DT_{0i}} \times 100$$

dimana,

$$DT_{0i} = \frac{NMS_{0i}}{\sum_{i=1}^T NMS_{0i}} \times 10000$$

Untuk penghitungan I_t

$$DT_{0i} = \frac{P_{0i}Q_{0i}}{\sum_{i=1}^B P_{0i}Q_{0i}} \times 100000 \quad \text{Untuk penghitungan Ib}$$

- DT_{0i} = Diagram timbangan dasar untuk komoditas i
 NMS_{0i} = Nilai Market Surplus dasar untuk komoditas i
 $P_{0i} Q_{0i}$ = Nilai Konsumsi dasar untuk komoditas i
 T = Jumlah komoditas pada paket komoditas sektor pertanian
 B = Jumlah komoditas pada sektor konsumsi dan biaya produksi

$$DT_{ni} = \frac{DT_{(t-1)i} \times RH_{ni}}{100}$$

- DT_{ni} = Diagram timbangan bulan ke-n untuk komoditas i.
 $DT_{(n-1)i}$ = Diagram timbangan bulan ke-(n-1) untuk komoditas i.
 RH_{ni} = Relatif harga bulan ke n untuk komoditi i.

2.7. Formula Untuk Penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP)

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

Dimana,

- NTP = Nilai Tukar Petani
 I_t = Indeks harga yang diterima petani
 I_b = Indeks harga yang dibayar petani

3.1. Indeks Harga Yang Diterima Petani (It)

Penimbang yang digunakan untuk It adalah nilai produksi yang dijual petani dari tiap jenis barang hasil pertanian tanaman bahan makanan dan perkebunan rakyat. Sebagai data pokok untuk penghitungan diagram timbangan ini diperlukan tiga macam data yaitu kuantitas produksi, harga produsen, dan persentase barang yang dijual (*marketed surplus*).

a. Kuantitas Produksi Tiap Jenis Tanaman

Data kuantitas produksi sektor tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan rakyat diperoleh dari Direktorat Statistik Pertanian, BPS, di samping data dari Direktorat Perkebunan Departemen Pertanian sebagai data penunjang.

b. Harga Produsen

Data harga produsen sesuai dengan tahun dasar di diperoleh dari hasil pencacahan daftar HP-2.1. dan HP-2.2 selama setahun (misal tahun 1993).

c. Persentase Marketed Surplus

Persentase *Marketed Surplus* adalah perbandingan antara nilai produksi yang dijual petani dengan nilai produksi yang dihasilkan per jenis tanaman pertanian. Data ini diperoleh dari hasil pengolahan khusus Sensus Sampel Pendapatan Petani tahun 1993. Dalam penghitungan nilai produksi yang dijual digunakan rumus:

$$NMS_i = \% MS_i \times P_i \times Q_i$$

dimana,

NMS_i = Nilai produksi yang dijual untuk jenis barang i

$\% MS_i$ = Persentase Market Surplus untuk jenis barang i

P_i = Harga produsen untuk jenis barang i

Q_i = Kuantitas produksi untuk jenis barang i

3.2. Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib)

Penimbang setiap jenis barang yang tercakup dalam pengeluaran konsumsi rumahtangga, biaya produksi dan penambahan barang modal adalah nilai setiap jenis barang yang dibeli petani dan tidak termasuk nilai barang yang diproduksi sendiri.

a. Sektor Konsumsi Rumah Tangga

Sumber data diperoleh dari hasil pengolahan SUSENAS untuk konsumsi rumah tangga daerah pedesaan dan dibatasi hanya untuk rumahtangga petani tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan rakyat. Karena penimbang yang diinginkan adalah nilai konsumsi total seluruh rumahtangga petani selama setahun, maka nilai konsumsi yang didapat dari hasil SUSENAS ini harus dikalikan dengan jumlah petani atau rumahtangga pedesaan dalam periode waktu setahun.

Untuk kelompok makanan, karena data SUSENAS khusus kelompok makanan dalam mingguan, maka harus dikali dengan jumlah minggu dalam setahun, yakni 52,14 minggu, sementara untuk kelompok bukan makanan datanya bulanan, maka dikali dua belas. Data jumlah petani atau rumahtangga pedesaan juga diperoleh dari SUSENAS. Jenis komoditas yang terdapat dalam SUSENAS ini harus disesuaikan dengan jenis barang yang ada pada daftar HP-1A dan daftar HP-1B untuk dapat mengikuti perkembangan harganya.

b. Sektor Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal

1) Kelompok Biaya Produksi, Upah dan Lainnya

Penimbang untuk kelompok ini adalah pengeluaran ongkos / biaya yang dikeluarkan oleh petani tetapi tidak termasuk ongkos produksi yang berasal dari produksi sendiri. Data tersebut didapat dari hasil pengolahan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, ST-SSPP. Penghitungan Nilai Biaya/Ongkos untuk setiap jenis barang dilakukan dengan cara:

$$NB_{(Bp)ij} = Rasio_{(Bp)ij} \times V_i$$

dimana,

$$NB_{(Bp)ij} = \text{Nilai biaya/ongkos produksi untuk jenis barang produksi pertanian } i, \text{ misal padi dan jenis biaya } j, \text{ misal pupuk}$$

$$Rasio_{(Bp)ij} = \text{Rasio/persentase biaya produksi terhadap total nilai produksi untuk jenis barang } i, \text{ misal padi, dan jenis biaya } j, \text{ misal pupuk}$$

$$V_i = \text{Nilai produksi } (P_i \times Q_i) \text{ untuk jenis barang } i$$

2) Kelompok Penambahan Barang Modal

Jenis barang yang tercakup pada kelompok ini adalah barang yang penggunaannya tahan lama (*durable goods*) seperti cangkul, bajak dan lainnya. Penimbang untuk kelompok ini diperoleh dari Survei Khusus Pendapatan Nasional dan Tabel Input - Output berupa persentase penambahan barang modal seperti cangkul, parang, linggis, arit, dan lainnya, dari tiap jenis tanaman. Untuk mendapatkan penimbang kelompok ini adalah dengan mengalikan persentase penambahan barang modal tadi dengan nilai produksi dari tiap jenis barang pertanian yang dihasilkan petani.

3.3. Klasifikasi Indeks dan Diagram Timbang

Diagram timbang/bobot setiap komponen dihitung untuk masing-masing provinsi. Indeks nasional untuk setiap komponen dihitung dari penjumlahan hasil perkalian indeks masing-masing komponen per provinsi dengan proporsi rumah tangga Sub Sektor TBM dan TPR di masing-masing provinsi.

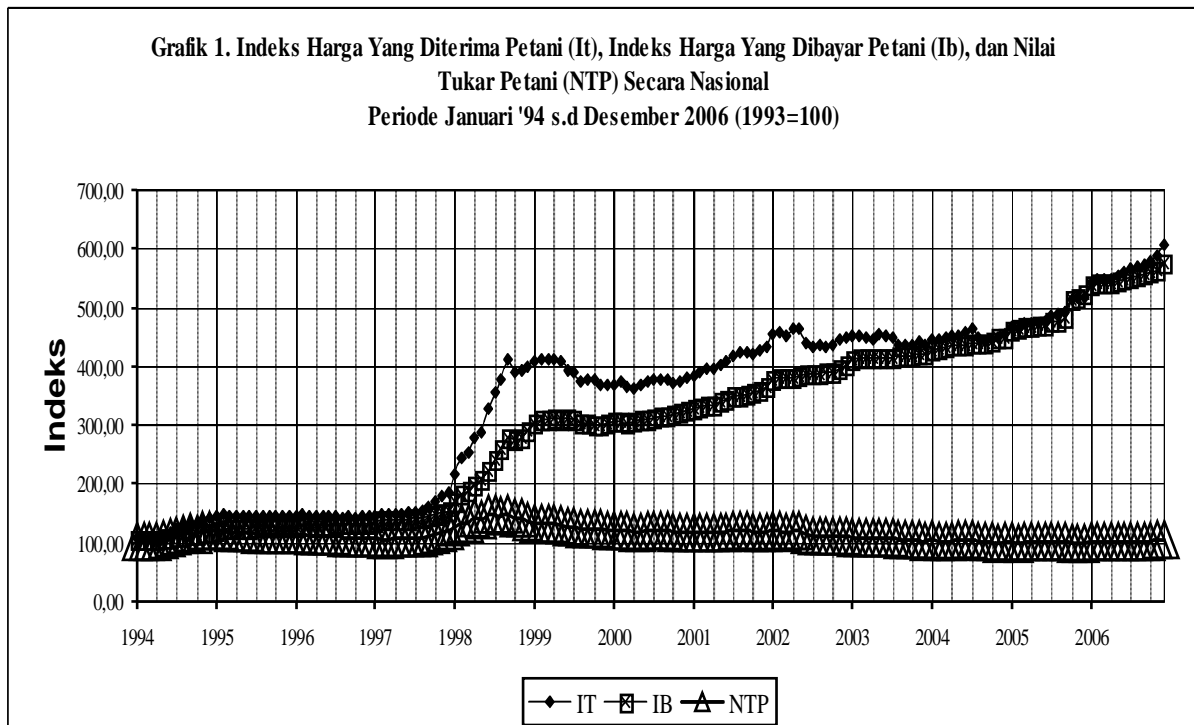
Klasifikasi Indeks dan contoh diagram/bobot disajikan dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Diagram Timbang/Bobot Menurut Sektor, Sub Sektor, kelompok, dan Sub Kelompok Di Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Utara (1993=100)

Sektor, Sub Sektor, Kelompok, Sub kelompok	Bobot	
	Jawa Tengah	Sulawesi Utara
A. Indeks Harga Yang Diterima Petani (It)		
I. Indeks Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan (TBM)	9.219,95	3.012,69
1. Indeks kelompok padi	3.739,86	1.423,30
2. Indeks kelompok palawija	2.407,40	1.244,11
3. Indeks kelompok sayuran	1.803,35	159,00
4. Indeks kelompok buah-buahan	1.269,34	186,28
II. Indeks Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR)	780,05	6.987,31
1. Indeks kelompok TPR	780,05	6.987,31
B. Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib)		
I. Indeks Kelompok Konsumsi Rumah Tangga (KRT)	6.957,62	6.298,50
1. Indeks sub kelompok makanan	3.466,63	3.439,87
2. Indeks kelompok perumahan	1.776,36	1.348,73
3. Indeks kelompok pakaian	551,80	514,13
4. Indeks kelompok aneka barang dan jasa	1.162,83	995,77
II. Indeks Kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	3.042,37	3.701,51
1. Indeks sub kelompok non faktor produksi	1.178,03	963,77
2. Indeks sub kelompok upah	1.702,75	2.354,66
3. Indeks sub kelompok lainnya	111,51	188,64
4. Indeks sub kelompok barang modal	50,08	194,44

4.1. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)

Secara nasional, perkembangan NTP mulai bulan Maret 1995 mengalami penurunan samapi 1997 (Grafik 1) yaitu masa krisis, hal ini disebabkan karena perkembangan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib) lebih cepat disbanding Indeks Harga Yang Diterima Petani (It). Setelah masa krisis yaitu awal tahun 1998, NTP mengalami lonjakan yang pesat, puncaknya terjadi pada bulan Juli 1998 yaitu sebesar 148,79 namun tidak bertahan lama hanya sampai bulan September 1998 dan seterusnya mengalami penurunan sampai sekarang. Hal tersebut disebabkan karena harga barang dan kebutuhan petani mengalami peningkatan, selain itu juga biaya produksi mengalami kenaikan pengaruh naiknya harga produksi, upah buruh pertanian, dan dicabutnya subsidi harga pupuk.



Pada Tabel 2, tercatat nilai NTP bulan Desember 2006 sebesar 105,78 atau naik 1,24 persen disbanding NTP bulan November 2006 yang mencapai 104,48. Hal ini disebabkan kenaikan harga produksi pertanian relatif lebih tinggi disbanding kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian.

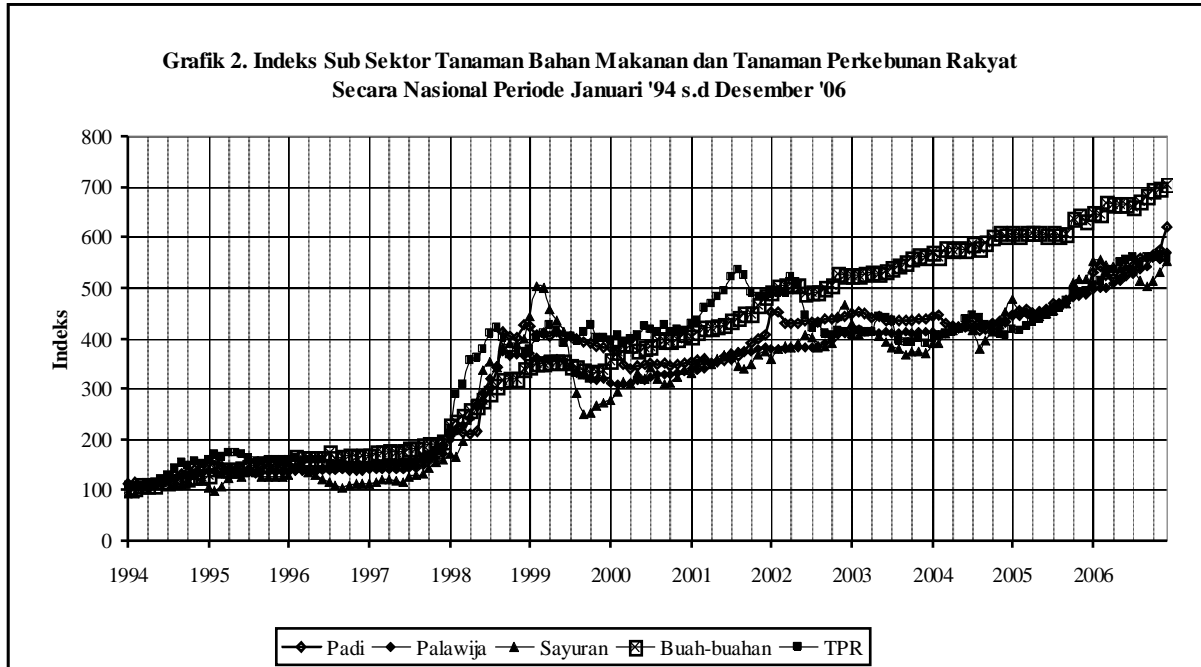
Tabel 2. Perubahan Nilai Tukar Petani (NTP) Bulan Nopember 2006 dan Desember 2006 Secara Nasional (1993 = 100)

Sektor, Kelompok dan Sub Kelompok	Indeks Nasional			Persentase Perubahan	
	Tahun 2005	Tahun 2006		Des 2006 thd Nov 2006	Des 2006 thd Des 2005
	Des	Nov ¹⁾	Des		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Indeks Harga yg Diterima Petani	517,10	588,45	608,08	3,34	17,59
1.1. Tanaman Bahan Makanan	508,32	574,26	600,76	4,61	18,19
1.1.1. Padi	489,55	576,79	619,73	7,44	26,59
1.1.2. Palawija	487,98	556,76	568,44	2,10	16,49
1.1.3. Sayur-sayuran	517,65	531,82	552,94	3,97	6,82
1.1.4. Buah-buahan	632,76	697,34	703,90	0,94	11,24
1.2. Tanaman Perkebunan Rakyat	493,85	565,41	557,81	-1,34	12,95
2. Indeks Harga yg Dibayar Petani	523,73	563,19	574,84	2,07	9,76
2.1. Konsumsi Rumah tangga	503,61	543,53	557,36	2,55	10,67
2.1.1. Makanan	495,07	538,48	561,59	4,29	13,44
2.1.2. Perumahan	522,51	562,66	567,94	0,94	8,70
2.1.3. Pakaian	488,04	529,16	530,27	0,21	8,65
2.1.4. Aneka Barang dan Jasa	515,95	540,61	543,24	0,49	5,29
2.2. Biaya Produksi & Penambahan Barang Modal	577,78	617,77	623,94	1,00	7,99
2.2.1. Bibit, pupuk & sewa tenaga	507,15	528,54	535,63	1,34	5,61
2.2.2. Upah	680,49	749,59	757,22	1,02	11,28
2.2.3. Lainnya	305,05	318,97	319,22	0,08	4,64
2.2.4. Penambahan Barang Modal	374,50	395,45	397,41	0,50	6,12
3. Nilai Tukar Petani	98,73	104,48	105,78	1,24	7,14

4.2. Perkembangan Harga Produk Pertanian

Perkembangan harga produk pertanian yaitu sub sector tanaman bahan makanan dan perkebunan rakyat dapat dilihat dari perkembangan Itnya (Grafik2).

Pada periode sebelum krisis perkembangan harga relative baik dengan trend yang menaik. Namun selama tahun 1998 terjadi lonjakan yang sangat berarti kemudian pada tahun 1999 mengalami penurunan yang tajam, setelah itu perkembangan harga pada tahun-tahun berikutnya semua mengalami fluktuasi.

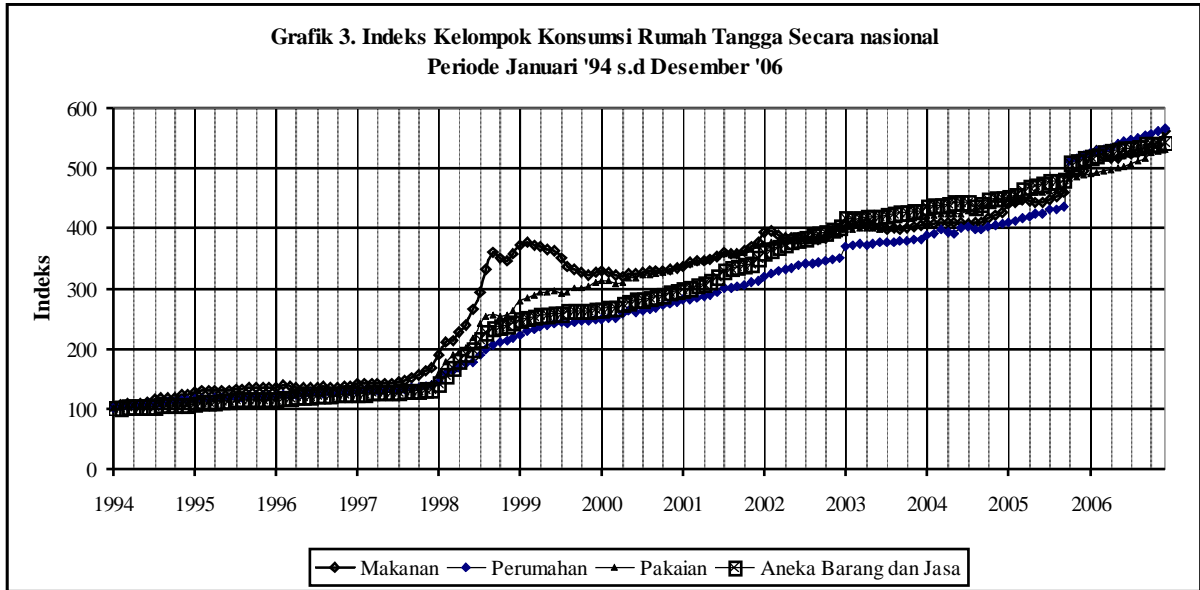


Pada Tabel 2, secara nasional Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) bulan Desember 2006 naik sebesar 3,34 persen dibanding It bulan November 2006, yaitu dari 588,45 Menjadi 608,08. Sub sektor Tanaman Bahan Makanan (TBM) mengalami kenaikan dibanding bulan November 2006 sebesar 4,61 persen, yaitu dari 574,26 menjadi 600,76. Penyebabnya adalah adanya kenaikan di empat kelompok yaitu kelompok Padi sebesar 7,44 persen; Palawija 2,10 persen; dan sayuran 3,97 persen; serta kelompok buah-buahan 0,94 persen. Namun sebaliknya untuk Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat mengalami penurunan pada bulan Desember 2006 dibanding bulan November 2005 sebesar 1,34 persen yaitu dari 656,41 menjadi 557,81.

4.3. Perkembangan Kebutuhan Petani

Perkembangan kebutuhan petani dapat dilihat pada perkembangan Indeks Harga Kelompok Konsumsi Rumah Tangga (Grafik 3).

Pada periode sebelum krisis, perkembangan harga kebutuhan petani relatif stabil dan bergerak searah/terkendali. Namun setelah masa krisis, harga-harga kebutuhan petani mengalami peningkatan yang tajam dan tak terkendali, hal ini disebabkan karena semua harga ditentukan oleh mekanisme pasar.



Pada Tabel 2, secara nasional Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib) bulan Desember 2006 naik sebesar 2,07 persen dibanding Ib bulan November 2006, yaitu dari 563,19 menjadi 574,84. Sub Sektor Konsumsi Rumah Tangga (KRT) naik sebesar 2,55 persen dibanding bulan November 2006 yaitu dari 543,53 menjadi 557,37. Kenaikan KRT disebabkan karena naiknya ke empat kelompok yaitu kelompok Makanan sebesar 4,29 persen; Perumahan 0,94 persen; Pakaian 0,21 persen; dan Aneka Barang dan Jasa 0,49 persen. Untuk Sub Sektor Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) pada bulan Desember 2006 naik sebesar 1,00 persen dibanding bulan November 2005, yaitu dari 617,77 menjadi 623,93. Kenaikan BPPBM disebabkan karena naiknya ke empat kelompok, yaitu kelompok Non Faktor Produksi sebesar 1,34 persen; Upah buruh 1,02 persen; Sayuran 0,08 persen; dan Penambahan Barang Modal 0,50 persen.